

Giroux, Pendidikan Postmodern, dan kurikulum kita

Ouda Teda Ena

Membicarakan pedagogi kritis tentu kita tidak bisa melupakan seorang tokoh pedagogi kritis yang mempunyai sumbangan yang penting yaitu Henry Giroux. Dia mengawali karir akademiknya sebagai guru sekolah menengah dan kemudian berkarir sebagai peneliti dan pengajar di berbagai universitas di Amerika dan Kanada. Dia telah menuliskan gagasan-gagasan yang umumnya tentang pedagogi kritis dalam lebih dari 50 buku dan di ratusan artikel ilmiah. Gagasan terpentingnya dibandingkan dengan para pemikir pedagogi kritis sebelumnya adalah tentang adanya harapan dalam institusi sekolah.

Pemikirannya bukanlah hal yang sama sekali baru. Dia melanjutkan tradisi teori kritis yang telah dibangun oleh para pemikir teori kritis sebelumnya yang tergabung dalam mazab Frankfurt atau *Frankfurt School* seperti Adorno, Marcuse, Horkheimer, Habermas, dan tokoh lainnya.

Menurut Bronner (2011) dalam teori kritis kebebasan tidak terkait dengan tatanan atau sistem pikiran tertentu. Teori kritis senantiasa mempertanyakan asumsi dan tujuan tersembunyi dari sebuah pemikiran yang bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Teori kritis menegaskan bahwa pemikiran harus menanggapi masalah baru dan melihat kemungkinan baru demi pembebasan diri dari kungkungan sejarah. Dalam arti sempit, teori kritis adalah penelitian interdisipliner yang dilakukan oleh anggota mazab Frankfurt dan para penerusnya. Perubahan social yang ideal harus dicapai berdasarkan penelitian-penelitian terutama kajian yang didasarkan pada teori perubahan social yang dikemukakan oleh Mark. Sedangkan dalam arti luas, teori kritis adalah istilah umum untuk mawadahi semua proyek penelitian dalam ilmu social dan humaniora yang menekankan keterlibatan politis.

Pemikiran pedagogi kritis awal sangat terpengaruh pemikiran dikotomis kekuasaan dan yang dikuasi. Ini tercermin dalam pemikiran dari Bowles dan Gintis misalnya. Mereka berpendapat bahwa sekolah adalah alat atau sarana yang dipakai oleh pemerintah (penguasa) untuk melanggengkan kekuasaan ideologinya. Ada sebuah 'kurikulum tersembunyi' yang diterapkan di sekolah oleh pemerintah. Siswa tidak dididik untuk menjadi kritis melainkan hanya dipersiapkan untuk menjadi pekerja yang siap pakai bagi industri kapitalis yang ada. Guru dan murid terjebak dalam kondisi dan situasi ini dan tidak bias membebaskan diri dari kungkungan ini.

Giroux mempunyai pemikiran yang berbeda. Menurutnya sekolah adalah sebuah lembaga yang relatif otonom. Dia juga berpendapat bahwa guru bukanlah orang yang latah secara budaya, yang hanya menyerah dan pasrah pada keadaan. Guru bukanlah boneka dari pemerintah atau penguasa. Menurutnya guru dan siswa bisa menjadi agen-agen perubahan. Oleh karena itu perlu adanya analisa yang mendalam tentang kurikulum sekolah untuk melihat sejauh mana muatan-muatan politik ada dalam kurikulum sekolah.

Giroux juga berpendapat bahwa budaya kekuasaan telah merasuk ke dalam kurikulum dan kehidupan persekolahan maka guru dan siswa harus mencari celah dalam tatanan yang sudah berakar kuat ini untuk merebut kembali daya agensi mereka. Kurikulum hari ditelaah secara kritis dan mendalam dengan mempertanyakan muatan budaya apa yang 'direstui' dan budaya apa yang 'dibungkam' dalam kurikulum tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Freire dalam bukunya *Pedagogy Kaum Tertindas* (1972) yang menekankan perlunya pemberdayaan kelompok sosial yang saat ini belum berdaya dengan mengembangkan program literasi yang berakar pada pengalaman konkret kelompok masyarakat itu dan budaya mereka sendiri.

Salah satu masalah yang dilihat oleh Giroux dalam makalahnya yang berjudul *"Border youth, difference, and postmodern education"* (1999) adalah adanya ketimpangan asumsi dasar yang dianut oleh lembaga pendidikan dan peserta didik. Lembaga pendidikan memakai asumsi dasar pemikiran modern sedangkan peserta didik adalah generasi postmodern yang mempunyai asumsi dasar pemikiran yang berbeda.

Menurut Giroux dalam asumsi pemikiran modern kurikulum sekolah tidak diterapkan untuk menghilangkan berbagai perbedaan yang ada tetapi hanya untuk mengatur perbedaan-perbedaan itu berdasarkan perbedaan kultur dan kelas social. Perbedaan kelas social, jender, dan etnisitas diabaikan sehingga budaya siswa dianggap seragam dan sejarah dianggap sebagai sesuatu yang linier. Tak jarang perbedaan budaya dianggap sebagai sebuah ancaman. Pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang harus dikuasi dan dikontrol. Pengetahuan yang dianggap sah dan bermutu adalah yang berasal dari buku dan teknologi sehingga pengetahuan dan budaya siswa tidak diakomodasi oleh kurikulum.

Asumsi pemikiran modern pada kurikulum sekolah ini menjadi problematis karena siswa adalah generasi yang menganut atau setidaknya terpapar oleh asumsi pemikiran-pemikiran postmodern. Dalam asumsi pemikiran postmodern misalnya tidak ada kebenaran yang bersifat absolut, semua agama dianggap benar, moralitas adalah sesuatu yang personal, globalisasi adalah sebuah norma dan batas nasionalisme menjadi kabur, serta asumsi-asumsi sejenis lainnya.

Dengan memahami kondisi tersebut di atas ada beberapa tantangan bagi dunia pendidikan untuk dapat memahami praktek pendidikan yang masih bersifat modernis yang menghambat tumbuh-kembangnya demokrasi multikultural secara radikal. Tantangan lain dari dunia pendidikan adalah memahami tumbuhnya sebuah generasi baru, generasi postmodern atau setidaknya generasi yang terpapar pada postmodernisme dengan berbagai dasar pemikirannya. Kenyataan ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pendidik untuk memanfaatkannya sehingga anak didik menjadi pelaku sejarah, bukan menjadi penonton atau bahkan korban sejarah.

Beranjak dari tantangan-tantangan tersebut di atas Giroux menyampaikan berbagai gagasan tentang pendidikan pada era postmodern. Pendidik harus menjadi lebih terlibat dan lebih politis untuk mengatasi praktek-praktek pendidikan yang berasal dari asumsi pemikiran modernis di mana kebenaran hanya dikuasi oleh mereka yang mempunyai modal kebudayaan dan teknologi, pengetahuan bersifat sentralistik dan perbedaan kebudayaan, etnisitas, jender, serta perbedaan lain diabaikan atau diseragamkan. Pendidik juga harus menyadari bahwa munculnya media elektronik dan berkurangnya kemampuan agensi telah merongrong visi tradisional pendidikan dan makna pedagogi.

Pedagogi postmodern adalah sebuah peluang untuk menata kembali sekolah sebagai ruang public yang demokratis. Pendidik pada jaman postmodern ini harus mempunyai pemahaman yang lebih mendalam tentang ideologi yang mempengaruhi pembentukan pengetahuan, resistensi terhadap kekuasaan, identitas diri yang terbentuk dalam budaya dominasi, dan mencari pendekatan-pendekatan baru untuk membebaskan pendidikan dari kungkungan struktur kekuasaan. Pedagogi postmodern tidak hanya terbatas pada menata ulang kurikulum yang memberdayakan teknologi informasi tetapi juga harus menegaskan kembali posisi pedagogi yang menyelaraskan hubungan antara otoritas, etika, dan pusat kekuasaan sehingga pendidikan memperluas kemungkinan menjadikan tatanan masyarakat menjadi demokratis secara radikal, tidak justru menutup ruang masyarakat marginal untuk mengenyam demokrasi.

Telaah Giroux tentang pendidikan postmodern ini didasarkan pada fakta-fakta yang ada di sekolah dan sistem pendidikan di Amerika. Bagaimana dengan kurikulum dan sistem pendidikan kita?

Pada tahun 2014 Jokowi terpilih menjadi presiden dan menetapkan bahwa ada dua kementerian yang mengurus masalah pendidikan. Pendidikan dasar dan menengah ditangani oleh satu kementerian sedangkan pendidikan tinggi ditangani oleh kementerian yang lain. Keputusan ini tentu berdasarkan satu filosofi pendidikan tertentu entah hal itu disadari atau tidak. Bahkan keputusan ini juga bias memiliki nuasan politik tertentu meskipun hal itu tidak pernah secara gamblang dijelaskan. Seperti yang disampaikan Giroux kita harus senantiasa menelaah setiap keputusan kebijakan pendidikan secara mendalam tidak hanya mengamati yang ada dipermukaan. Pendidik harus senantiasa bertanya apa pengaruh sebuah kebijakan pendidikan terhadap kehidupan persekolahan dan anak didik.

Sampai pada saat menteri pendidikan dan kebudayaan dicopot oleh presiden beberapa waktu yang lalu belum ada kejelasan tentang kurikulum pendidikan dasar dan menengah kita. Mendikbud yang barupun belum secara tegas menetapkan kurikulum. Kurikulum tentu tidak hanya kita pahami sebagai dokumen resmi dari pemerintah tetapi juga praktek keseharian sekolah adalah sebuah kurikulum. Belum lagi ada yang kita sebut sebagai kurikulum tersembunyi, sebuah asumsi atau ideology dari sebuah praktek di dalam dunia pendidikan yang tidak tertulis atau terkatakan tetapi mewarnai praktek pendidikan sehari-hari di sekolah.

Kurikulum, baik sebagai dokumen, praktek, ataupun asumsi yang tersembunyi harus selalu dicermati secara kritis oleh para pendidik sehingga guru dan siswa bias merebut peran sebagai agen dalam proses pendidikan. Apabila guru dan siswa tidak mengambil peran tersebut maka mereka hanya kan selalu menjadi korban kebijakan dan sekolah hanya menjadi replikasi masyarakat yang belum berkeadilan. Menyitir istilah Giroux, guru dan siswa harus mencari celah pada baju zirah kekuasaan sehingga sekolah akan mendorong tercapainya sebuah tatanan masyarakat yang demokratis.

Bronner, S. E. (2011) *Critical Theory: A very short introduction*. New York: Oxford University Press.

Castells, M. dkk (1999) *Critical education in the new informational age*. New York: Rowman & Littlefield Publisher

Payne, M. & Barbera, J.R. (2010) *A Dictionary of Cultural and Critical Theory*. West Sussex: Blackwell Publishing.

Wan Shun Eva Lam (2004) "Border Discourses and Identities in Transnational Youth Culture." In Jabari Mahiri (ed.), *What They Don't Learn In School: Literacy in the Lives of Urban Youth*. New York: Peter Lang Publishers.